



BAB I **PENDAHULUAN**

1.1. Dasar Pembentukan Organisasi

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Jambi Nomor Tahun 2016, dan Peraturan Gubernur Jambi , Nomor 56 TAHUN 2016, tentang Kedudukan dan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi. Mempunyai tugas pokok sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor Tahun 2016 adalah : ***Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan Di Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi***

Untuk melaksanakan tugas pokok diatas, maka Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi menyelenggarakan urusan di bidang Pembinaan, Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas, Bidang Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja dan Bidang Transmigrasi untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan Daerah dalam Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, maka Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis, administrasi, dan operasional pelaksanaan pelayanan dan Pembinaan, Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas, Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja serta Transmigrasi;
2. penyelenggaraan pelayanan teknis operasional di Bidang Pembinaan, Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas, Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja serta Transmigrasi;



3. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dukungan administrasi, dan kerjasama kepada seluruh unsur satuan organisasi di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
4. pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi di Kabupaten/Kota;
5. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi; dan
6. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Secara rinci tugas pokok dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi yang secara operasional dilaksanakan oleh Bidang dan Seksi dapat diuraikan sebagai berikut :

I. SEKRETARIAT

Tugas

Mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas bidang dan pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian perencanaan program, pengelolaan urusan umum, kepegawaian serta pengelolaan keuangan dan penataan asset dinas.

Fungsi

- a. perumusan kebijakan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja dinas;
- b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, asset, kerumahtanggaan, kearsipan, dan dokumentasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
- c. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- d. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja serta pengelolaan pelayanan kesekretariatan;



- e. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan;
- f. pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan ketatausahaan, keuangan, asset dan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- g. perumusan kebijakan dan pengkoordinasian administrasi pengelolaan keuangan;
- h. pelaksanaan pembinaan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan dinas;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- j. perumusan kebijakan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
- k. pelaksanaan koordinasi antar Bidang dan kerja sama dengan SKPD terkait dalam pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- l. perumusan kebijakan dan pengkoordinasian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan dinas;
- m. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

II. BIDANG PEMBINAAN, PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PRODUKTIVITAS

Tugas

Melaksanakan tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi pelatihan, penempatan dan produktivitas tenaga kerja.

Fungsi

- a. merumuskan kebijakan teknis program kerja Bidang Pembinaan Pelatihan, Penempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- b. merumuskan kebijakan teknis penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria pembinaan pelatihan, penempatan tenaga kerja dan produktivitas;
- c. merumuskan kebijakan teknis pengembangan pasar kerja;



- d. merumuskan kebijakan teknis perluasan kesempatan kerja;
- e. merumuskan kebijakan teknis penempatan tenaga kerja;
- f. merumuskan kebijakan teknis koordinasi penempatan tenaga kerja;
- g. merumuskan kebijakan teknis pembinaan pelatihan dan pemagangan;
- h. merumuskan kebijakan teknis standardisasi sertifikasi dan kompetensi;
- i. merumuskan kebijakan teknis pembinaan produktivitas;
- j. merumuskan kebijakan teknis pembinaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
- k. merumuskan kebijakan teknis koordinasi penyelenggaraan pembinaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
- l. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- m. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Pembinaan Pelatihan, Penempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- n. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- o. menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

III. BIDANG PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Tugas

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan ketenagakerjaan dan hubungan industrial.

Fungsi

- a. Koordinasi penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan norma kerja, jaminan sosial, perempuan, dan anak;
- b. Koordinasi penyiapan bahan pelayanan di bidang pengawasan norma kerja, jaminan sosial, perempuan dan anak;
- c. Koordinasi penyiapan bahan evaluasi di bidang pengawasan norma kerja, jaminan sosial, perempuan dan anak;



- d. Koordinasi penyiapan bahan pelaporan di bidang pengawasan norma kerja, jaminan sosial, perempuan dan anak;
- e. Verifikasi pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) daerah provinsi;
- f. Koordinasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
- g. Koordinasi pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan, pelaksanaan mogok kerja, dan penutupan perusahaan;
- h. Koordinasi pembentukan dan pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Bipartit di perusahaan;
- i. Koordinasi pemberian fasilitasi dan/atau mediasi terhadap potensi perselisihan di perusahaan, mogok kerja, dan penutupan perusahaan;
- j. Koordinasi pembinaan, penyuluhan, bimbingan, dan monitoring hubungan industrial;
- k. Koordinasi penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK);
- l. Menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya

IV. BIDANG TRANSMIGRASI

Tugas

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Ketransmigrasian.

Fungsi

- a. Merumuskan kebijakan teknis penyusunan program bidang ketransmigrasian;
- b. Merumuskan kebijakan teknis penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ketransmigrasian;
- c. Merumuskan kebijakan teknis dan pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah transmigrasi, pembangunan



- permukiman transmigrasi, fasilitasi penempatan dan pemindahan transmigran, kerjasama kelembagaan, potensi kawasan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat transmigran;
- d. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketransmigrasian;
 - f. Merumuskan kebijakan teknis dan penyelenggaraan koordinasi Pembangunan Wilayah di Kabupaten/Kota;
 - g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi No. 56. Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi mempunyai 4 UPTD yaitu :

1. Balai Latihan Kerja dan Produktifitas (BLKP)

Secara rinci tugas pokok dan fungsi UPTD pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi, dapat diuraikan sebagai berikut :

I. BALAI LATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS (BLKP)

Tugas

Melaksanakan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja dan pelatihan peningkatan produktivitas tenaga kerja disemua sektor usaha pada instansi pemerintah, BUMN, BUMD dan Koperasi, serta melaksanakan pelatihan bagi para transmigran dan atau calon transmigrasi. Selain itu melaksanakan pelatihan untuk instruktur / tenaga ahli baik swasta maupun pemerintah dari dalam dan luar negeri.

Fungsi

- a. Menyusun rencana dan program, pengembangan system serta kerjasama pelatihan.



- b. Menyiapkan dan melaksanakan pelatihan pencari kerja, tenaga kerja, tenaga pelatihan, tenaga ahli pelatihan, baik swasta maupun pemerintah dari dalam dan luar negeri serta pelaksanaan uji ketrampilan, pelatihan, transmigran dan atau calon transmigran dan penduduk sekitar permukiman serta pelatihan, manajemen dan produktivitas.
- c. Memasarkan program, fasilitas, hasil produksi, jasa dan hasil pelatihan, serta pemberian layanan informasi pelatihan.
- d. Memasyarakatkan produktivitas tenaga ahli.
- e. Mengukur dan menganalisa produktivitas regional, sektoral, perusahaan dan tenaga kerja.
- f. Memberi masukan sebagai bahan pertimbangan penetapan kebijaksanaan pengembangan produktivitas tenaga kerja kepada pemerintah daerah dan swasta.
- g. Mengevaluasi dan melaporkan, memantau hasil pelatihan dan menganalisis data alumni serta jenis pelatihan.
- h. Mengurus tatausaha pengelolaan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

Susunan Organisasi Balai Kerja dan Produktivitas , terdiri dari:

- a. Kepala
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Kepala Seksi
- d. Kelompok Jabatan Fungsional Instruktur

II. UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2018 telah terbentuk Balai Pengawasan Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi.



UPTD Balai Pengawasan Ketenagakejaan berjumlah sebanyak 3 (tiga) UPTD yaitu Wilayah 1 berada di Kabupaten Muara Jambi, Wilayah II berada di Kabupaten Bungo dan Wilayah di berada di Kabupaten Kerinci.

Tugas

UPTD Balai Pengawasan ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas teknis operasional pada dinas dibidang pemeriksaaan dan pelayanan norma kerja dan norma keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Fungsi

- a. Penyusunan rencana, Program Kerja dan anggaran UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan;
- b. Penyiapan bahan kebijakan teknis dibidang pembinaan norma kerja dan norma keselamatan kerja dan kesehatan Kerja (K3)
- c. Pelaksanaan Pemeriksaan dan pelayanan dibidang Pengawasan norma kerja dan norma keselamatan dan kesehatan kerja (k3)
- d. Pelaksanaan evaluasi dibidang pemeriksaan dan pelayanan norma kerja dan norma keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
- e. Pelaporan dibidang pemeriksaan dan pelayanan norma kerja dan keselamatan kerja (k3).
- f. Pelaksanaan kebijakan dibidang pengawasan norma kerja dan norma keselamatan dan kesehatan kerja (K3)
- g. Pengelolaan pelayanan dibidang pengawasan norma kerja dan norma keselamatan dan kesehatan kerja (K3)
- h. Pemeriksaan bahan evaluasi dibidang pemeriksaan dan pelayanan norma kerja dan norma keselamatan dan kesehatan kerja (K3)
- i. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Susunan Organisasi Balai Pengawasan Ketenagakerjajaan , terdiri dari:

- a. Kepala
- b. Sub Bagian Tata Usaha



- c. Kepala Seksi
- d. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan.

1.3. Aspek Strategis Organisasi

Aspek Strategis dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, didukung dengan regulasi, antara lain :

1. Adanya UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Adanya UU No. 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian yang mengubah pendekatan pembangunan transmigrasi dari pendekatan perpindahan penduduk menjadi pendekatan pengembangan kawasan, dengan memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada pemerintah daerah dan mendorong peran serta masyarakat.
3. Adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Adanya Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 1965 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
5. Adanya Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan

1.4. Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Adapun isu strategis yang menjadi dasar dalam menetapkan kebijakan strategis Pembangunan dalam bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi adalah sebagai berikut:

a. Isu Strategis Bidang Ketenagakerjaan

Adapun yang menjadi *Isu Strategis* dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan di Provinsi Jambi adalah :

- Banyaknya angkatan kerja terdidik dan jumlah penganggur yang belum terserap di pasar kerja.



- Rendahnya produktivitas tenaga kerja yang menyebabkan daya saing tenaga kerja lokal belum siap untuk memasuki pasar kerja MEA.
- Tuntutan dunia kerja yang membutuhkan kompetensi dan sertifikasi bagi tenaga kerja dan instruktur.
- Tingginya minat pencari kerja untuk mendapatkan pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja, namun anggaran pelatihan sangat terbatas.
- Adanya tuntutan bagi pencari kerja dalam penguasaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, Cina, Jepang dan Arab.
- Adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana salah satu kebijakan pemerintah adalah mengembalikan tenaga pengawas ketenagakerjaan Kabupaten/Kota menjadi pegawai pemerintah Provinsi, sehingga dibutuhkan tambahan anggaran untuk kegiatan pengawasan.

a. Isu Strategis Bidang Ketransmigrasian

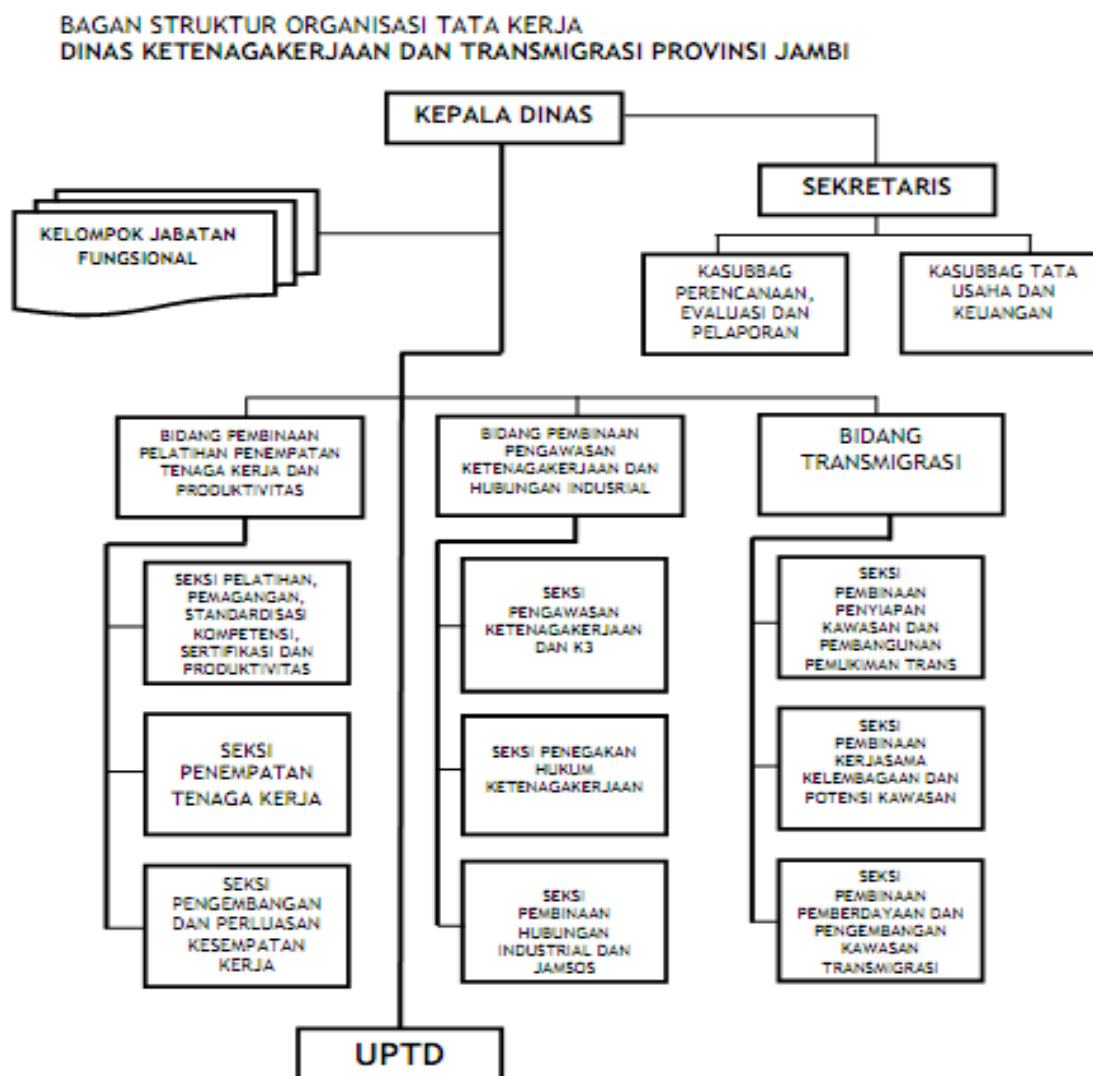
Adapun yang menjadi *Isu Strategis* dalam penyelenggaraan ketransmigrasian di Provinsi Jambi adalah :

- Berakhirnya masa pembinaan oleh Pemerintah Provinsi Jambi terhadap UPT Bina yang ada.
- Konflik lahan transmigrasi yang belum diselesaikan
- Lahan Usaha 2 yang belum tersedia
- Pengelolaan program transmigrasi yang telah berpindah ke Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.



1.5. Struktur Organisasi

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Nakertrans Provinsi Jambi



1.6 SUMBER DAYA SKPD

1) Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi, berjumlah orang, dengan klasifikasi sebagaimana pada **tabel 1.1**.



TABEL 1.1
JUMLAH PNS DINAS NAKERTRANS PROVINSI JAMBI
(MENURUT KEPANGKATAN)

Golongan	Pangkat	Ruang	Banyaknya
IV	Pembina Utama	IV-e	0 orang
	Pembina Utama Madya	IV-d	0 orang
	Pembina Utama Muda	IV-c	1 orang
	Pembina Tk. I	IV-b	18 orang
	Pembina	IV-a	9 orang
III	Penata Tk. I	III-d	36 orang
	Penata	III-c	37 orang
	Penata Muda Tk. I	III-b	32 orang
	Penata Muda	III-a	51 orang
II	Pengatur Tk. I	II-d	2 orang
	Pengatur	II-c	2 orang
	Pengatur Muda Tk. I	II-b	1 orang
	Pengatur Muda	II-a	0 orang
I	Juru Tk. I	I-d	1 orang
	Juru	I-c	0 orang
	Juru Muda Tk. I	I-b	1 orang
	Juru Muda	I-a	0 orang
Jumlah			158 orang



TABEL 1.2
JUMLAH PNS DINAS NAKERTRANS PROVINSI JAMBI
(MENURUT JENJANG PENDIDIKAN)

Diploma 3	6 orang
Diploma 4	2 orang
S-1	83 orang
S-2	17 orang
S-3	0 orang
Jumlah	158 orang

2). Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi tampak pada **Tabel 1.3.**

Tabel 1.3 : Sarana dan Prasarana Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi (Data belum terinventarisasi)

No.	Jenis Barang/Nama Barang	Jumlah	Keterangan
A.	BANGUNAN DAN GEDUNG <ul style="list-style-type: none">- Gedung Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi- Rumah Dinas (Kepala)- Gedung UPTD BPTT- Tempat Beribadah/Mushollah	1 Unit 1 Unit	
B.	PERALATAN DAN MESIN <ul style="list-style-type: none">• Alat angkutan kendaraan roda 4• Alat angkutan kendaraan roda 2• Alat-alat bengkel dan alat-alat ukur• Alat Studio dan Komunikasi<ul style="list-style-type: none">➡ Faksimile➡ Pesawat Telpon	726 Unit	Tahun 1991



3). Sumber Daya Balai Latihan Kerja (BLK) UPTD BLKP

UPTD Balai Latihan Kerja dan Produktifitas Provinsi Jambi, merupakan salah satu unsur pelaksana teknis yang secara organisator berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi. Sebagai salah satu sumber daya yang dimiliki Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, maka BLK diharapkan menjadi potensi dalam mendorong penciptaan kesempatan kerja melalui upaya peningkatan kualitas pelatihan, penyiapan sarana dan prasarana pelatihan serta instruktur yang berpengalaman. Berikut disajikan Sumber Daya yang dimiliki Balai Latihan Kerja (BLK)/UPTD BLKP Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi, sebagaimana pada **tabel 1.4** berikut.

Tabel 1.4. Sarana dan Prasarana UPTD Balai Pelatihan Tenaga Kerja dan Transmigrasi (BPTT) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi

NO.	URAIAN	LUAS	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Gedung Kantor BPTT	225 M2	1 Buah	
2.	Gedung Teori (Tata Niaga)	504 M2	1 Buah	
3.	Gedung Bengkel Bangunan	567 M2	1 Buah	
4.	Gedung Bengkel Automotif	1.134 M2	1 Buah	
5.	Gedung Bengkel Tekmek (Las)	819 M2	1 Buah	
5.	Gedung Bengkel Listrik	567 M2	1 Buah	
7.	Gedung Gudang	72 M2	1 Buah	
8.	Gedung Aula	-	1 Buah	
9.	Gedung Kantin	100 M2	1 Buah	
10.	Gedung Mess	36 M2	1 Buah	
11.	Pos Jaga	9 M2	1 Buah	
12.	Gedung Garasi	96 M2	1 Buah	
13.	Gedung Menjahit	-	1 Buah	
14.	Rumah Dinas	1.850 M2	35 Buah	



15.	Taman, Halaman, Kebun & Jalan	42.742 M2	-
16.	Parkir	54 M2	-
17.	WC	81 M2	-
18.	Selasar	1.080 M2	-
19.	Mussholla	64 M2	1 Buah

Sumber : BPTT Provinsi Jambi, 2018

Selain itu, guna menunjang terselenggaranya kegiatan pelatihan pada UPTD BPTT (BLK) Provinsi Jambi, berikut dapat dilihat personil UPTD BPTT sebagaimana **tabel 1.5** berikut.

Tabel 1.5. Jumlah Pegawai/Staf UPTD Balai Kerja dan Produktivitas Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi

NO.	URAIAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
A. JABATAN STRUKTURAL				
1.	Ka. UPTD (Eselon III.b)	1 Orang	1 Orang	-
2.	(Eselon IV.a)	3 Orang	1 Orang	2 Orang
3.	Staf Pelaksana/Fungsional Umum	12 orang	5 orang	7 orang
B. JABATAN FUNGSIONAL				
1.	Tenaga Instruktur	20 orang	14 orang	6 orang
Jumlah		34 orang	21 orang	15 orang

Sumber : TU, UPTD BPTT 2019

Jenis Pelatihan yang dilaksanakan di UPTD BPTT (BLK) Provinsi Jambi, dapat dilihat pada **tabel 1.6** berikut.

Tabel 1.6. Spesifikasi dan Jenis Pelatihan pada Balai Pelatihan Tenaga Kerja dan Transmigrasi (BPTT) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi

No.	JURUSAN DAN JENIS PELATIHAN	LAMANYA/JAM LATIHAN
A. JURUSAN AUTOMOTIF		
1.	Mobil Bensin	45 hari (240 JAMLAT)
2.	Sepeda Motor	45 hari (240 JAMLAT)
B. JURUSAN LISTRIK		
1.	Elektronika TV	45 hari (240 JAMLAT)



2.	Tehnisi HP	45 hari (240 JAMLAT)
3.	Instalasi Listrik	45 hari (240 JAMLAT)
4.	Tehnisi Pendingin (AC)	45 hari (240 JAMLAT)
5.	Menggulung Dinamo	45 hari (240 JAMLAT)
6.	Tehnisi Audio	45 hari (240 JAMLAT)
7.	Wikel	45 hari (240 JAMLAT)
C. JURUSAN TEHNIK		
1.	Las Listrik	45 hari (240 JAMLAT)
2.	Bubut	45 hari (240 JAMLAT)
3.	Ketok Duku	45 hari (240 JAMLAT)
D. JURUSAN BANGUNAN		
1.	Meubel	45 hari (240 JAMLAT)
2.	Bangunan Batu	45 hari (240 JAMLAT)
3.	Bangunan Kayu	45 hari (240 JAMLAT)
4.	Memasang Keramik	45 hari (240 JAMLAT)
5.	Memasang conblok	45 hari (240 JAMLAT)
E. JURUSAN TATA NIAGA		
1.	Akuntansi Komputer	45 hari (240 JAMLAT)
2.	Operator Komputer	45 hari (240 JAMLAT)
3.	Sekretaris Kantor	45 hari (240 JAMLAT)
4.	Administrasi Perkantoran	45 hari (240 JAMLAT)
F. JURUSAN ANEKA		
1.	Bordir	45 hari (240 JAMLAT)
2.	Menjahit	45 hari (240 JAMLAT)
3.	Seni Ukir	45 hari (240 JAMLAT)
G. PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT		
1.	Pengolahan Hasil Pertanian	45 hari (240 JAMLAT)

Sumber : UPTD BPTT Provinsi Jambi, 2019



4). Mitra Kerja

Dalam penyelenggaraan pelayanan SKPD, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi mempunyai mitra kerja dengan berbagai organisasi kemasyarakatan dan lembaga swasta, seperti pada **Tabel 1.7.**

Tabel 1.7. Mitra Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi

No	MITRA KERJA	JUMLAH
1.	BPJS Ketenagakerjaan	1 Lembaga
2.	Lembaga Pelatihan Kerja swasta	158 Lembaga
3	Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta	27 buah
4	Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)	1 Lembaga
5	Organisasi Pekerja (Federasi/Konfederensi Serikat Pekerja/Serikat Buruh)	310 buah
6	Lembaga Kerja (LKS) Bipartit	1 perusahaan 1 LKS
7	Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)	1 Pembina
8	Dewan Pengupahan Provinsi Jambi	1 Dewan



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

1. Visi

Visi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai selama kurun waktu dari tahun 2016-2021, yaitu :

**“ Terwujudnya Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan
Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Menuju Jambi
TUNTAS Tahun 2021”**

Makna dari pernyataan “Visi” tersebut diatas, sebagai berikut :

1. Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Ketenagakerjaan, mengandung arti bahwa ketenagakerjaan merupakan sumber inventasi ekonomi yang di harus diwujudkan dalam usaha-usaha untuk memperluas kesempatan kerja, mendorong peningkatan produktivitas, daya saing dan kompetensi tenaga kerja serta dapat menciptakan iklim perlindungan kerja yang sehat dan aman. Tujuan dari visi ini adalah untuk menciptakan peluang kesempatan kerja yang seluas-luasnya bagi masyarakat Provinsi Jambi, melalui sinergi antar sektor dan stake holder terkait yang akanberimplikasi kepada terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kemiskinan.
2. Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Ketransmigrasian, mengandung arti bahwa keteransmigrasian merupakan potensi yang besar untuk di optimalkan kembali untuk mendorong agar tidak terjadi ketimpangan pertumbuhan dan pembangunan antar desa dan kota. Tujuan dari visi ini adalah agar masyarakat transmigrasi dapat meningkatkan pengelolaan potensi dan sumber-sumber daya lokal yang ada di lokasi transmigrasi secara produktif untuk membuka aksesibilitas bagi pusat-pusat



pertumbuhan desa dan wilayah serta membuka kesempatan masyarakat untuk ber-transmigrasi.

2.Misi

Misi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi merupakan rumusan secara garis besar mengenai cara dan upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh SKPD beserta perangkatnya untuk mewujudkan Visi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi, yaitu :

- a. **Misi 1:** Meningkatkan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja.
- b. **Misi 2 :** Mendorong peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja.
- c. **Misi 3:** Mendorong peningkatan perlindungan dan jaminan sosial tenaga kerja untuk menciptakan kondisi kerja yang kondusif.
- d. **Misi 4 :** Mendorong pengembangan kawasan transmigrasi.

3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan atau merupakan penjabaran atau implementasi untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis dalam Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi yang dihadapi.

a. Tujuan

Adapun Tujuan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi tahun 2016-2021, yaitu :

1) Tujuan Penyelenggaraan Bidang Ketenagakerjaan, antara lain :

- a. Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja.
- b. Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.
- c. Terwujudnya Perlindungan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.



2) Tujuan Penyelenggaraan Bidang Ketransmigrasian, antara lain :

- a. Terwujudnya Pengembangan Wilayah Transmigrasi berbasis Kawasan.

b. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, dan diharapkan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan dan dapat memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Provinsi Jambi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun sasaran untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi tahun 2016-2021, yaitu :

1) Sasaran Penyelenggaraan Bidang Ketenagakerjaan, antara lain :

- a. Meningkatnya peluang Kesempatan Kerja Sektor Formal dalam dan Luar Negeri.
- b. Meningkatnya Kualitas SDM Tenaga Kerja.
- c. Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja.

2) Sasaran Penyelenggaraan Bidang Transmigrasi, antara lain :

- a. Meningkatnya Cakupan Kawasan yang layak huni.

Rumusan tujuan dan sasaran yang berkaitan dengan misi pembangunan penyelenggaraan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, **sebagaimana terlampir pada table 2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD**



4. Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021. Hal ini mengingat rencana kinerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang.

Indikator kinerja SKPD sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcomes/ hasil) dari kegiatan (output/ keluaran). Indikator kinerja program adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran, karena hasil (outcomes) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Dalam hal ini, dalam melihat kinerja daerah pada dasarnya digambarkan melalui tingkat capaian sasaran dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja pemerintah.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja daerah dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama (***key performance indicator***). Sebagaimana



lazimnya sebuah alat ukur untuk mengukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut : (1) terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah, (2) menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan, (3) memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah, dan (4) terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Secara rinci, penetapan indikator kinerja utama Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 menuju JAMBI TUNTAS 2021 dapat diuraikan pada lampiran tabel 2.1. **Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.**



5. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan adalah suatu langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran dari misi yaitu dalam rangka memecahkan permasalahan pembangunan kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi.

Arah strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi dalam rangka pembangunan kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Provinsi Jambi adalah untuk mencapai bidang pembangunan :

a. Ketenagakerjaan, yaitu

- Meningkatkan peluang kesempatan kerja sektor formal dan informal dalam dan luar negeri bagi pencari kerja dan angkatan kerja.
- Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di Balai Latihan Kerja Provinsi dan Kabupaten/Kota
- Meningkatkan Kualitas Pelatihan Keterampilan Kerja Berbasis Masyarakat.
- Meningkatkan Kualitas dan Pelatihan Keterampilan Kerja Berbasis Kewirausahaan
- Meningkatkan Pelatihan Produktivitas bagi tenaga kerja yang produktif
- Meningkatkan kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan lembaga pelatihan kerja swasta
- Menyelenggarakan Program Pemagangan bagi pencari kerja.
- Melaksanakan akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja.
- Meningkatkan kualitas SDM dalam penyelenggaraan pelatihan kerja
- Meningkatkan kompetensi dalam penyelenggaraan pelatihan kerja.



- Meningkatkan peran Lembaga Perlindungan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- Meningkatkan ketenangan bekerja dan berusaha bagi tenaga kerja dan perusahaan.
- Meningkatkan penerapan Norma-Norma Ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

b. Ket transmigrasian, yaitu

- Mengembangkan wilayah transmigrasi berbasis masyarakat desa.
- Mendorong peningkatan usaha produktif bagi warga binaan transmigrasi.
- Mendorong pengembangan kawasan KTM yang produktif.
- Meningkatkan penyediaan layanan informasi bidang ket transmigrasian

Strategi, Bidang Ketenagakerjaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi, adalah sebagai berikut :

- 1). Meningkatkan peluang kesempatan kerja sektor formal dan informal dalam dan luar negeri bagi pencari kerja dan angkatan kerja, dengan cara :
 - Meningkatkan mekanisme pelayanan penempatan tenaga kerja.
 - Memperluas akses kesempatan kerja dalam dan luar negeri.
 - Memperluas Kesempatan Kerja Sektor Informal melalui Pembentukan Wira Usaha Baru (WUB)
 - Mengendalikan penggunaan tenaga kerja asing.
 - Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan dalam bidang penempatan tenaga kerja.
 - Melakukan penyuluhan bagi Calon Tenaga Kerja ke Luar Negeri.
 - Menyusun analisa dan rekomendasi peluang kesempatan kerja pada sektor usaha informal yang produktif.



- Mengevaluasi hasil capaian dan penyempurnaan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Jambi
- Memberdayakan tenaga kerja mandiri terdidik dan tenaga kerja Pemuda Mandiri (TKPMP)
- Mendayagunakan Tenaga Kerja Sarjana (TKS).
- Memberdayakan Masyarakat melalui Padat Karya Produktif.
- Penguatan Lembaga Bursa Kerja Khusus (BKK)/Bursa Kerja Swasta.
- Meningkatkan kualitas Fungsional Pengantar Kerja dan Antar Kerja.
- Mengembangkan Teknologi Tepat Guna (TTG).
- Menyediakan informasi pasar kerja (IPK).
- Meningkatkan Koordinasi Pengiriman dan Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri.
- Meningkatkan koordinasi antara pusat dan daerah melalui Rapat Kerja Teknis dalam Bidang Penempatan Tenaga Kerja.
- Menyusun kerangka rekomendasi kebijakan penempatan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja melalui monitoring sektor formal dan informal.

2) Meningkatkan Kualitas Pelatihan Kerja, dengan cara :

- Peningkatkan pelayanan pelatihan bagi pencari kerja di Balai Latihan Kerja berbasis Kompetensi.
- Peningkatan Pelayanan Pelatihan berbasis masyarakat melalui Mobile Training Unit (MTU) ke Kabupaten/Kota.
- Pelaksanaan uji kompetensi bagi tenaga instruktur pada Balai Latihan Kerja.
- Pelaksanaan uji kompetensi tenaga kerja non konstruksi yang disertifikasi sesuai kompetensi.
- Pelaksanaan akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja Swasta



- Penyediaan sarana dan prasarana pelatihan Balai Latihan Kerja dalam rangka menunjang pelatihan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
 - Meningkatkan kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan lembaga pelatihan kerja swasta (LPKS)
 - Melaksanakan Kompetisi bagi Instruktur di BLK/LPKS.
 - Mendorong peningkatan kualitas pengelola pelatihan dan instruktur melalui upgrading.
 - Memonitor hasil pelaksanaan pelatihan di BLK bagi tenaga kerja yang telah terserap di pasar kerja.
- 1) Meningkatkan Pelatihan Produktivitas bagi tenaga kerja yang produktif, dengan cara :
- a. Melakukan uji kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Kerja;
 - b. Mendorong produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan produktivitas tenaga kerja yang berorientasi dari produktivitas rendah ke produktivitas yang tinggi.
 - c. Mendorong peningkatan kewirausahaan produktif
 - d. Menyiapkan skema pembiayaan dan SDM yang berkualitas untuk mengikuti pemagangan ke luar negeri pada sektor industri dan tenaga medis/perawat
 - e. Menyediakan akses program pemagangan dalam negeri.
 - f. Meningkatkan koordinasi ke luar negeri dalam rangka pengiriman dan penempatan peserta magang.
- 4) Meningkatkan peran Lembaga Perlindungan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dengan cara :
- a. Mendorong perluasan kepersertaan BPJ Ketenagakerjaan
- 5) Meningkatkan ketenangan bekerja dan berusaha bagi tenaga kerja dan perusahaan, dengan cara :
- a. Menurunkan jumlah pekerja anak di Provinsi Jambi;
 - b. Menurunkan pelanggaran hukum di bidang ketenagakerjaan;



- c. Mendorong perusahaan dalam menerapkan norma ketenagakerjaan.
 - d. Meningkatkan optimalisasi dan kualitas pengawasan Norma Ketenagakerjaan
 - e. Meningkatkan penerapan K3 dan SMK3
- 6) Meningkatkan penerapan Norma-Norma Ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, dengan cara :
- a. Membahas hasil survey KHL dan pengupahan (UMP).
 - b. Melaksanakan pengujian lingkungan kerja sesuai standar.
 - c. Melaksanakan pelatihan Ahli K3 Umum.
 - d. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan dalam bidang ketenagakerjaan
 - e. Meminalisirterjadinya perselisihan Hubungan Industrial.
 - f. Mendorong perusahaan dalam menyusun struktur dan skala upah.
 - g. Meningkatkan fungsi Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit.
 - h. Meningkatkan fungsi Lembaga Kerja Sama Tripartit.
 - i. Melakukan penyidikan tindak pidana dalam bidang ketenagakerjaan.

Strategi, Bidang Ketransmigrasian yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi, adalah sebagai berikut :

- 1) Mengembangkan wilayah transmigrasi berbasis masyarakat desa, dengan cara meningkatkan penyediaan lahan bagi penempatan transmigrasi.
- 2) Mendorong peningkatan usaha produktif bagi warga binaan transmigrasi, dengan cara :
 - a. Meningkatkan pemanfaatan lahan usaha yang ada.
 - b. Meningkatkan jumlah UPT binaan yang melaksanakan kegiatan usaha produktif pada sektor pertanian, peternakan dan perkebunan



yang cocok dengan lokasi penempatan serta usaha home industri lainnya.

- c. Meningkatkan kesiapan mental dan spiritual warga transmigran dalam kehidupan sehari-hari dan kebutuhan dasar lainnya
- 3) Mendorong pengembangan kawasan KTM yang produktif, dengan cara mempercepat keberfungsian Kawasan KTM yang lebih produktif melalui pengembangan sektor-sektor potensial yang cepat tumbuh dan mendorong percepatan pertumbuhan kawasan
- 4) Meningkatkan penyediaan layanan informasi bidang ketransmigrasian, dengan cara mempromosikan perkembangan pembangunan kawasan transmigrasi melalui transmigrasi expo.

Strategi, Bidang Pelayanan Organisasi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi, adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pelayanan administrasi dengan berorientasi pada peningkatan kinerja dan kebutuhan pelayanan.
- b. Meningkatkan ketersediaan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang efektif sesuai dengan proporsi kerja yang dibebankan kepada SKPD.
- c. Meningkatkan disiplin aparatur melalui pemenuhan kebutuhan aparatur yang efektif dan efisien.
- d. Meningkatkan kapasitas dan SDM aparatur melalui pembinaan dan peningkatan pengetahuan aparatur.
- e. Meningkatkan Sistem Pengembangan Sistem Pelaporan Organisasi, melalui penajaman visi dan misi organisasi dan Pemerintah Provinsi Jambi ke dalam Perencanaan yang tepat sesuai kebutuhan pelayanan sektor publik.



6. Program dan Kegiatan

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, sebagai salah satu SKPD yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan 2 (dua) urusan, yaitu 1 (satu) urusan wajib non pelayanan dasar bidang ketenagakerjaan serta 1 (satu) urusan pilihan bidang ketransmigarian, telah menyusun tahapan-tahapan implementasi perencanaan melalui program dan kegiatan sebagai bentuk dukungan tujuan, sasaran dalam Visi dan Misi organisasi.

Adapun Program dan kegiatan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi pada tahun 2020 , adalah sebagai berikut :

I. Program Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas

- 1) Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja ((Mobile Training unit/ MTU) .
- 2) Pendidikan dan pelatihan dan keterampilan bagi pencari kerja berbasis kompetensi (PBK).
- 3) Pelatihan kewirausahaan produktif
- 4) Pelatihan peningkatan produktivitas tenaga kerja
- 5) Pemagangan dalam dan luar negeri
- 6) Pendidikan dan pelatihan bahasa asing bagi calon tenaga kerja dan magang keluar negeri
- 7) Sertifikasi kompetensi bagi lulusan lembaga pelatihan (BLK dan LPKS)
- 8) Kerjasama pelatihan dengan lembaga pelatihan kerja swasta(LPKS).
- 9) Kerjasama pelatihan dengan lembaga pelatihan kerja swasta(LPKS).
- 10) Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)



II. Program Pemberdayaan Tenaga Kerja

- 1) Perluasan kesempatan kerja sektor informal bagi masyarakat melalui pembentukan kelompok wirausaha baru (WUB) dan padat karya infrastruktur.
- 2) Pengembangan dan perluasan kesempatan kerja dalam dan luar negeri melalui penempatan tenaga kerja AKL,AKD,TKI,TKA dan informasi pasar kerja.
- 3) Penyuluhan calon tenaga kerja indonesia (CTKI)keluar negeri bagi tenaga perawat dan perawat lansia
- 4) Monitoring dan pembinaan tenaga kerja sektor formal dan informal
- 5) Pengembangan masyarakat melalui terapan teknologi tepat guna (TTG)
- 6) Pendayagunaan Tenaga Sarjana (TKS)

III. Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

- 1) Sosialisasi K3 dan penilaian penghargaan
- 2) Penetapan UMP tahunan
3. Pengembangan mekanisme lembaga kerjasama tripartit
- 4 . Pengawasan norma ketenagakerjaan dan sosialisasi perundang-undangan ketenagakerjaan.
6. Penegak hukum/penyidikan dibidang ketenagakerjaan
7. Pengujian lingkungan kerja

IV. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

- 1) Penanganan Permasalahan lokasi transmigrasi
- 2) Publikasi melalui informasi otensi lokasi dan kerjasama antar daerah



- 3) Penyiapan Area Transmigrasi
- 4) Monitoring pembangunan kawasan wilayah transmigrasi)
- 5) Monitoring pengembangan kawasan wilayah transmigrasi

2.2 Perjanjian Kinerja

Untuk dapat mengukur keberhasilan dari Implementasi Rencana Strategis 2016 – 2021 diatas, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi menetapkan target untuk masing masing sasaran yang harus dicapai, target ini dituangkan dalam Dokumen Perjanjian Kerja Tahun 2020.

Perjanjian Kinerja Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
(2)	(3)	(4)	
Meningkatnya Peluang Kesempatan kerja Sektor formal dalam dan luar negeri	Persentase tenaga kerja terdaftar yang ditempatkan	30.00	%
Meningkatnya kualitas SDM tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang dilatih dan bersertifikasi Kompetensi	4,50	%
Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Peningkatan kepatuhan norma norma ketenagakerjaan	70.00	%
Meningkatnya Cakupan kawasan yang layak huni	Persentase peningkatan kawasan penempatan Transmigran	8.00	%
	Persentase Penyelesaian permasalahan lahan Transmigrasi	38,79	%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Akuntabilitas Kerja dan Keuangan	Nilai IKM Untuk Kepuasan Masyarakat	80	%
	Nilai SAKIP	62	%



Program	Kegiatan
Program Pemberdayaan Tenaga Kerja	Rp. 816.674.573,-
Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Rp. 756.941.632,-
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Rp. 745.971.142,-
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Rp. 433.185.000,-
Program Pelayanan Adm. Perkantoran	Rp. 934.965.780,-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 740.133.858,-
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 0
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 41.211.345,-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 129.607.000,-
Jumlah	Rp. 4.608.690.330



BAB III.

AKUNTABILITAS KINERJA

Pendekatan manajemen Pembangunan berbasis kinerja, yang utama adalah bahwa pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik. Hal ini mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Sebagai bagian dari komitmen Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi untuk membangun akuntabilitas kinerja ini, pengembangan web-monev nantinya menjadi mendorong pengendalian, evaluasi yang transparan dan berorientasi pada perbaikan pelayanan publik.

Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja



No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode Kriteria
1.	91 % \leq 100 %	Sangat Tinggi	
2.	76 % \leq 90 %	Tinggi	
3.	66 % \leq 75 %	Sedang	
4.	51 % \leq 65 %	Rendah	
5.	\leq 50 %	Sangat rendah	

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1. Capaian Indikator Kinerja Utama 2020

Tabel 3.2

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

Sasaran Strategis 1				
Meningkatnya Peluang Kesempatan Kerja Sektor Formal dalam dan Luar Negeri				
Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% (Capaian)	Kriteria
Persentase tenaga kerja yang terdaftar yang ditempat.	30	24,92	83,06	
Sasaran Strategis 2				
Meningkatnya Kualitfas SDM Tenaga Kerja				
Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% (Capaian)	Kriteria
Persentase Tenaga Kerja yang dilatih dan bersertifikasi Kompetensi	4,5	1,53	33,33	
Sasaran Strategis 3				
Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja				
Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% (Capaian)	Kriteria
Persentase peningkatan kepatuhan terhadap norma norma Ketenagakerjaan	70	87,72	125,32	



Sasaran Strategis 4				
Meningkatnya Cakupan Kawasan yang layak huni				
Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% (Capaian)	Kriteria
Persentase peningkatan Kawasan penempatan Transmigrasi	8	0	0	
Persentase Penyelesaian Permasalahan Lahan Transmigrasi	38,79	30,44	78,47	

Sasaran Strategis 5 <i>Perjanjian Kinerja</i>				
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Akuntabilitas Kerja dan Keuangan				
Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% (Capaian)	Kriteria
Nilai IKM Untuk Kepuasan Masyarakat	80	85,18	106,47	
Nilai SAKIP	62	60,20	97,09	

3.1.1.1 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.

Pada Tahun Anggaran 2020, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi telah menetapkan sebanyak 4 Sasaran Strategis yang akan dicapai. Ke 4 sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan 7 Indikator Kinerja.

1. SASARAN STRATEGIS SATU

” Meningkatkan Peluang Kesempatan Kerja Sektor Formal dalam dan Luar Negeri “

Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi pada sasaran I (satu) ini telah memberikan capaian **tinggi** walaupun jauh dari target ini terlihat dari angka realisasi rata-rata 83,06 persen. Secara spesifik realisasi kinerja sasaran strategis 1 dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut :



Tabel 3.3 Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis 1				
Meningkatnya Peluang Kesempatan Kerja Sektor Formal dalam dan Luar Negeri				
Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% (Capaian)	Kriteria
Persentase tenaga kerja yang terdaftar yang ditempat.	30	24,92	83,06	

Analisis atas capaian indikator-indikator sasaran 1 adalah sebagai berikut

Formulasi Perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan}}{\text{Jumlah Tenaga Kerja Yang terdaftar}} \times 100$$

Capaian kinerja Tenaga Kerja terdaftar yang ditempatkan di Provinsi Jambi sebagaimana tabel tersebut diatas menunjukkan kinerja yang **tinggi** pada Tahun 2020 walaupun jauh dari target. Capaian ini menyumbang sebanyak 24,92 % dari target yang telah ditetapkan. Dengan target pada Renstra 2020 sebesar 30 % dan Capaian pada 2020 sebesar 83,06 %, hal tersebut kondisi covid -19 , banyak perusahaan yang merumahkan pekerja dan PHK, karena menurunnya tingkat produksi Perusahaan, dan ini berdampak pada formasi lowongan kerja yang ada di Perusahaan, dengan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan sebanyak 1.872 orang dari tenaga Kerja yang terdaftar di Kabupaten/Kota se- Provinsi jambi sebanyak 7.513 orang .

2. SASARAN STRATEGIS DUA

” Meningkatkan Kualitas SDM Tenaga Kerja “

Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi pada sasaran II (dua) ini telah memberikan capaian **Rendah** ini terlihat dari angka realisasi



rata-rata 33,33 persen. Secara spesifik realisasi kinerja sasaran strategis 2 dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut :

Tabel 3.4 Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis 2				
Meningkatnya Kualitfas SDM Tenaga Kerja				
Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Persentase	Kriteria
Persentase Tenaga Kerja yang dilatih dan bersertifikasi Kompetensi	4,5	1,53	33,33	

Analisis atas capaian indikator-indikator sasaran 2 adalah sebagai berikut

Formulasi Perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah Tenaga Kerja yang dilatih dan bersertifikasi}}{\text{Jumlah Penganggura Terbuka Tahun 2020}} \times 100$$

Capaian kinerja Tenaga Kerja yang dilatih dan bersertifikasi di Provinsi Jambi sebagaimana tabel tersebut diatas menunjukkan kinerja yang **Rendah** pada Tahun 2020. Capaian ini menyumbang sebanyak 1,53 % dari target yang telah ditetapkan. Dengan target pada Renstra 2020 sebesar 4,5 % dan Capaian pada 2020 sebesar 33,33 %, dengan jumlah tenaga kerja yang dilatih dan bersertifikasi sebanyak 1.437 orang dari tenaga Kerja yang dilatih dan bersertifikasi di Kabupaten/Kota se Provinsi jambi dengan jumlah penggganguran Terbuka pada Tahun 2020 sebanyak 94.000 orang, hal tersebut terjadinya penurunan Pelatihan Tenaga Kerja kerana penundaaan beberapa kegiatan pelatihan dampak covid-19 baik itu menggunakan dana APBD maupun APBN.

3. SASARAN STRATEGIS TIGA

” Meningkatkan Perlindungan Tenaga Kerja “



Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi pada sasaran III (tiga) ini telah memberikan capaian yang **sangat tinggi** ini terlihat dari angka realisasi 125,32 persen. Secara spesifik realisasi kinerja sasaran strategis 3 dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut :

Tabel 3.5 Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 3

Sasaran Strategis 3				
Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja				
Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Persentase	Kriteria
Persentase peningkatan Kepatuhan terhadap norma norma Ketenagakerjaan	70	87,72	125,32	

Analisis atas capaian indikator-indikator sasaran 3 adalah sebagai berikut

Formulasi Perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Ketenagakerjaan}}{\text{Jumlah Perusahaan yang terdaftar}} \times 100$$

Capaian kinerja peningkatan kepatuhan terhadap norma norma Ketenagakerjaan di Provinsi Jambi sebagaimana tabel tersebut diatas menunjukkan kinerja yang **sangat tinggi** pada Tahun 2020. Capaian ini menyumbang sebanyak 87,72 % dari target yang telah ditetapkan. Dengan target pada Renstra 2019 sebesar 70 % dan Capaian pada 2020 sebesar 125,32 %, dengan jumlah Perusahaan yang telah menerapkan Norma Ketenagakerjaan sebanyak 3.610 Perusahaan di Kabupaten/Kota se Provinsi jambi dari Jumlah Perusahaan yang terdaftar dalam Wajib Lapor Perusahaan sebanyak 4.115 Perusahaan.



4. SASARAN STRATEGI SEMPAT

” Meningkatkan Cakupan Kawasan yang layak huni “

Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi pada sasaran IV (empat), Indikator Kinerja Peningkatan Kawasan Penempatan Transmigrasi sangat rendah sekali yaitu Angka 0 %, dan untuk Indikator Kinerja Penyelesaian Permasalahan Lahan Transmigrasi ini memberikan capaian yang **tinggi** ini terlihat dari angka realisasi 78,47 persen. Secara spesifik realisasi kinerja sasaran strategis 4 dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut :

Tabel 3.6 Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 4

Sasaran Strategis 4				
Meningkatnya Cakupan Kawasan yang layak huni				
Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Persentase	Kriteria
Persentase peningkatan Kawasan penempatan Transmigrasi	8	0	0	
Persentase Penyelesaian Permasalahan Lahan Transmigrasi	38,79	30,44	78,47	

Analisis atas capaian indikator-indikator sasaran 4 adalah sebagai berikut

Formulasi Perhitungan :

1. $\frac{\text{Jumlah KK Transmigran yang ditempatkan}}{\text{Jumlah KK Transmigran dalam pencadangan}} \times 100$
2. $\frac{\text{Jumlah lahan bidang yang terselesaikan}}{\text{Jumlah Lahan Bidang yang bermasalah}} \times 100$

Capaian kinerja peningkatan Kawasan penempatan Transmigrasi sebagaimana tabel tersebut diatas menunjukkan kinerja yang **sangat Rendah** pada Tahun 2020. Capaian ini 0 % dari target yang telah ditetapkan. Dengan target pada Renstra 2020 sebesar



8 %, hal ini disebabkan Calon Lokasi transmigrasi Desa Sungai Aur yang semula merupakan Wilayah Kabupaten Muaro Jambi , ternyata berdasarkan hasil penetapan batas wilayah yang baru pada Bulan Nopember 2019, masuk kedalam wilayah Administrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur, untuk itu seluruh Persyaratan sebagai Calon Lokasi Transmigran harus direvisi ulang mulai dari usulan Desa sampai SK Pencandagan Oleh Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Untuk Calon lokasi baru yang telah dilakukan survey lokasi serta memiliki kelengkapan administrasi berupa RTSP yaitu pada Kabupaten Sarolangun Lokasi Desa Simpang Nibung Kecamatan Singkut dan akan dilanjutkan ke Penyusunan RKT.

Selanjutnya Capaian Indikator Kinerja Penyelesaian Permasalahan Lahan Transmigran pada 2020 sebesar 78, 47 %, Dengan target pada Renstra 2020 sebesar 38,79 % dan Capaian pada 2020 sebesar 30,44 %, dengan jumlah lahan yang terselesaikan sebanyak 4.254 bidang Lahan dari Jumlah Bidang Lahan yang bermasalah sebanyak 13.977 Bidang Lahan.

5. SASARAN STRATEGIS KELIMA

” Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik Akuntabilitas Kerja dan Keuangan “

Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi pada sasaran 5 (lima) ini telah memberikan capaian yang **sangat tinggi** ini terlihat dari Nilai IKM angka capaian angka 106, 47 %, dari target 80 % dengan Realisasi sebesar 85,18 % nilai IKM dan 97, 09 untuk nilai SAKIP, target 62 % dan realisasi sebesar 60,20 % Secara spesifik realisasi kinerja sasaran strategis 5 dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut :



Tabel 3.7 Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 5

Sasaran Strategis 5 <i>Perjanjian Kinerja</i>				
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Akuntabilitas Kerja dan Keuangan				
Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Persentase	Kriteria
Nilai IKM Untuk Kepuasan Masyarakat	80	85,18	106,47	
Nilai SAKIP	62	60,20	97,09	

3.1.2. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020 dengan tahun lalu (2019) dan beberapa tahun terakhir (2018)

Tabel 3.8 Perbandingan Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	% (Capaian)		Capaian 2020		
		2018	2019	Target	realisasi	% (Capaian)
1	Persentase tenaga kerja yang terdaftar yang ditempatkan.	101,8	118,37	30	24,92	83,06
2	Persentase Tenaga Kerja yang dilatih dan bersertifikasi Kompetensi	148,8	190	4,5	1,53	33,33
3	Persentase peningkatan Kepatuhan terhadap norma norma Ketenagakerjaan	122,5	116,1	70	87,72	125,32
4	Persentase peningkatan Kawasan penempatan Transmigrasi	-	-	8	-	-



5	Persentase Penyelesaian Permasalahan Lahan Transmigrasi	93,6	99	38,79	30,44	78,47
---	--	------	----	-------	-------	-------

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.

1. Capaian kinerja Tenaga Kerja terdaftar yang ditempatkan di Provinsi Jambi sebagaimana tabel 3.8 tersebut, pada tahun 2018 capaiannya sebesar 101,8 % , pada Tahun 2019 capainya sebesar 118,37 % , kemudian pada tahun 2020 turun dengan Capaian 83, 08 % , hal tersebut kondisi covid -19 , banyak perusahaan yang merumahkan pekerja dan PHK, karena menurunnya tingkat produksi Perusahaan, dan ini berdampak pada formasi lowongan kerja yang ada di Perusahaan, dengan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan sebanyak 1.437 orang dari tenaga Kerja yang terdaftar di Kabupaten/Kota se- Provinsi jambi sebanyak 7.513 orang .
2. Capaian kinerja Tenaga Kerja yang dilatih dan bersertifikasi di Provinsi Jambi sebagaimana tabel 3.8 tersebut, pada tahun 2018 capaiannya sebesar 148,8 % , pada Tahun 2019 sebesar 190 % , dan tahun 2020 turun dengan Capaian 33, 33 % , hal tersebut terjadinya penurunan Pelatihan Tenaga Kerja karena penundaaan beberapa kegiatan pelatihan dampak covid-19 baik itu menggunakan dana APBD maupun APBN.
3. Capaian kinerja peningkatan kepatuhan terhadap norma norma Ketenagakerjaan di Provinsi Jambi sebagaimana tabel 3.8 tersebut diatas, pada tahun 2018 capainnya sebesar 122,5 % pada Tahun 2019 sebesar 116,1 , dan pada Tahun 2020 meningkat menjadi 125 , 32 % menunjukan kinerja yang **sangat tinggi** pada Tahun 2020. % , dengan jumlah Perusahaan yang telah menerapkan Norma Ketenagakerjaan sebanyak 3.610 Perusahaan di Kabupaten/Kota se Provinsi jambi dari Jumlah Perusahaan yang terdaftar dalam Wajib Lapor Perusahaan sebanyak 4.115 Perusahaan.



4. Capaian kinerja peningkatan Kawasan penempatan Transmigrasi sebagaimana tabel tersebut diatas menunjukkan kinerja yang **sangat Rendah** pada Tahun 2018, 2019 dan 2020. Capaian ini 0 % dari target yang telah ditetapkan. Dengan target pada Renstra 2020 sebesar 8 %, *hal ini disebabkan Calon Lokasi transmigrasi Desa Sungai Aur yang semula merupakan Wilayah Kabupaten Muaro Jambi , ternyata berdasarkan hasil penetapan batas wilayah yang baru pada Bulan Nopember 2019, masuk kedalam wilayah Administrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur, untuk itu seluruh Persyaratan sebagai Calon Lokasi Transmigran harus direvisi ulang mulai dari usulan Desa sampai SK Pencandagan Oleh Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur.* Untuk Calon lokasi baru yang telah dilakukan survey lokasi serta memiliki kelengkapan administrasi berupa RTSP yaitu pada Kabupaten Sarolangun Lokasi Desa Simpang Nibung Kecamatan Singkut dan akan dilanjutkan ke Penyusunan RKT.
5. Selanjutnya Capaian Indikator Kinerja Penyelesaian Permasalahan Lahan Transmigran pada 2018 capaiannya sebesar 93, 6 % , pada tahun 2019 naik menjadi 99 % dan tahun 2020 menjadi turun sebesar 78, 47 % , , dengan jumlah lahan yang terselesaikan sebanyak 4.254 bidang Lahan dari Jumlah Bidang Lahan yang bermasalah sebanyak 13.977 Bidang Lahan.

3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2020

3.2.1 Program dan Kegiatan

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi selama tahun 2020 melalui dana APBD Provinsi Jambi mendapatkan anggaran sebesar Rp. 7.806.373.660,- , setelah dilakukan Refocusing Anggaran untuk Covid- 19, sebesar 40,96 % menjadi sebesar Rp. 4.608.690.330,-. Untuk melaksanakan kegiatan Urusan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dengan realisasi Rp. 4.548.937.163,- (98,70%) dengan realisasi fisik 98,99%, untuk mendanai 9 Program yaitu:

- 1) Program pelayanan administrasi perkantoran
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur



- 3) program peningkatan disiplin aparatur
- 4) program peningkatan sumber daya aparatur
- 5) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
- 6) Program peningkatan kompetensi tenaga kerja dan
Produktivitas
- 7) Program pemberdayaan tenaga kerja
- 8) Program perlindungan dan pengembangan lembaga
ketenagakerjaan
- 9) Program pengembangan wilayah transmigrasi

3.2.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Program pelayanan administrasi perkantoran

Tugas dari program ini adalah membantu dinas dalam rangka mengkoordinasikan dan mengedalikan tugas tugas bidang dan pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian perencanaan program, pengelolaan urusan umum, kepegawaian , keuangan, dan aset Dinas. Besarnya anggaran yang tersedia untuk program pelayanan Administrasi adalah sebesar Rp.943.965.780,- dengan realisasi sebesar Rp.905.236.541,- (95,90 %) dengan realisasi fisik sebesar 96.20%. Untuk mewujudkan sasaran program ini dilakukan melalui 10 (sepuluh) kegiatan yaitu:

1) Penyedia jasa surat menyurat

Kegiatan jasa surat menyurat dengan dana sebesar 6.441.000,- dengan realisasi 6,150.000 (95,84%) dengan realisasi fisik sebesar (95,84%)

2) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik

Kegiatan jasa surat menyurat dengan dana sebesar 330.000.000,- dengan realisasi 296.925.346,- (89,98%) dengan realisasi fisik sebesar 90,80%. Dengan sisa anggaran



- 33.074.654,-dikarenakan kelebihan listrik dan wifi yang digunakan (efektif & efesien anggaran)
- 3) Kegiatan penyediaan Jasa Administrasi keuangan
dengan dana sebesar 196.500.000,- dengan realisasi 191.683.500,- (97,55%) dengan realisasi fisik sebesar 97,55 %.
 - 4) Kegiatan jasa kebersihan kantor
dengan dana sebesar Rp.190.000.000,- dengan realisasi Rp.189.600.000,- (99,79%) dengan realisasi fisik sebesar (99,79%)
 - 5) Kegiatan penyediaan alat tulis kantor
dengan dana sebesar Rp.65.000.000,- dengan realisasi Rp. 65.000.000,- (100%) dengan realisasi fisik sebesar 100%.
 - 6) Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
dengan dana sebesar Rp.30.000.000,- dengan realisasi Rp.29.998.400,- (99,99%) dengan realisasi fisik sebesar 100%.
 - 7) Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
dengan dana sebesar Rp.20.000.000,- dengan realisasi Rp Rp.20.000.000,- (100%) dengan realisasi fisik sebesar 100%.
 - 8) Kegiatan bahan bacaan dan peraturan perundanga-undangan
dengan dana sebesar Rp2.500.000,- dengan realisasi Rp 2.500.000,- (100%) dengan realisasi fisik sebesar 100%.
 - 9) Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman
dengan dana sebesar Rp.10.420.780,- dengan realisasi Rp Rp10.370.780,- (99,53%) dengan realisasi fisik sebesar 100%.
 - 10) Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
dengan dana sebesar Rp.93.104.780,- dengan realisasi Rp. Rp.93.008.515,- (99,90%) dengan realisasi fisik sebesar 100%.



Tugas dari program ini adalah membantu dinas dalam rangka mengkordinasikan dan mengedalikan tugas tugas bidang dan pengelolaan pelayanan kesekretariatn yang meliputi pengkoordinasian perencanaan program, pengelolaan urusan umum, kepegawaian , keuangan, dan aset Dinas. Besarnya anggaran yang tersedia untuk program peningkatan sarana dan prasarana aparatur adalah sebesar Rp.740.133.858.800,- dengan realisasi sebesar Rp.737.291.548,- (99,62 %) dengan realisasi fisik sebesar 99,77%. Untuk mewujudkan sasaran program ini dilakukan melalui 6 (enam) kegiatan yaitu:

- 1) Pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan anggaran dana sebesar Rp. 32.400.000,- dengan realisasi Rp. 32.400.000,- dengan realisasi (100,%) fisik sebesar (100%)
- 2) Pengadaan meubeler dengan dana sebesar 173.800.858,- dengan realisasi 172.370.000. (99,18%) dengan realisasi fisik sebesar (99,18%)
- 3) Pengadaaan komputer dengan dana sebesar 16.200.000,- dengan realisasi 16.200.000,- (100,%) dengan realisasi fisik sebesar (100,%)
- 4) Kegiatan Rehabilitasi Sedang/berat gedung kantor dengan dana sebesar Rp.306.200.000,- dengan realisasi Rp.305.908.248,- (99,90%) dengan realisasi fisik sebesar (99,90%)
- 5) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan dana sebesar Rp.146.533.000,- dengan realisasi Rp.145.413.300,- (99,24%) dengan realisasi fisik sebesar 100,%.
- 6) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dengan dana sebesar Rp.65.000.000,- dengan realisasi Rp.65.000.000,- (100%) dengan realisasi fisik sebesar 100%.



3. Program peningkatan disiplin aparatur

Tugas dari program ini adalah membantu dinas dalam rangka mengkoordinasikan dan mengedalikan tugas tugas bidang dan pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian perencanaan program, pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, dan aset Dinas.

Kegiatan

1) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

dengan dana sebesar Rp.0 dengan realisasi 0. (0%) dengan realisasi fisik sebesar 0 %.

4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Tugas dari program ini adalah membantu dinas dalam rangka mengkoordinasikan dan mengedalikan tugas tugas bidang dan pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian perencanaan program, pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, dan aset Dinas. Besarnya anggaran yang tersedia untuk program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur adalah sebesar Rp.41.211.346,- dengan realisasi sebesar Rp.39.760.000 (96,48 %) dengan realisasi fisik sebesar (96,48%) Untuk mewujudkan sasaran program ini dilakukan melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu:

- 1) Kegiatan fasilitasi jabatan fungsional, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis, dengan dana sebesar Rp.4.350.000 dengan realisasi. Rp.4.350.000 (100%) dengan realisasi fisik sebesar (100%).
- 2) Penyediaan data bidang nakertrans dalam rangka pemenuhan data SIPD. dengan dana sebesar 33,861,345- dengan realisasi 33,810,000. (99,85%) dengan realisasi fisik sebesar (99,85%) %.
- 3) Kegiatan pembinaan jasmani dan rohani aparatur dengan dana sebesar 3.000.000,- dengan realisasi 1.600.000,- (53.33%) dengan realisasi fisik sebesar (53.33%)

5. Program peningkatan pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan



Outcome dari program ini adalah membantu dinas dalam rangka merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Dinas. Besarnya anggaran yang tersedia untuk program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan adalah sebesar Rp.129.607.000 dengan realisasi sebesar Rp.129.607.000 (100 %) dengan realisasi fisik sebesar 100%. Untuk mewujudkan sasaran program ini dilakukan melalui 1 (satu) kegiatan yaitu:

Kegiatan

- 1) Kegiatan Penyusunan laporan rutin program dan perkembangan SKPD Penerapan SPM dan laporan aset dan keuangan dengan dana sebesar Rp.129.607.000,- dengan realisasi Rp.129.607.000,- (100,%) dengan realisasi fisik sebesar 100 %.

6. Program Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas

Tugas dari program ini adalah membantu Dinas dalam rangka menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi pelatihan, penempatan dan produktivitas tenaga kerja.

Besarnya anggaran yang tersedia untuk Program Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas adalah sebesar Rp.756.941.632,- dengan realisasi sebesar Rp.755.025.632,- (99,75 %) dengan realisasi fisik sebesar 99,98%. Untuk mewujudkan sasaran program ini dilakukan melalui 8 (delapan) kegiatan yaitu:

Kegiatan

- 1) Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja (Mobile Training unit/ MTU) dengan dana sebesar Rp.137.763.500 dengan realisasi 137.763.500. (100%) dengan realisasi fisik sebesar (100%).
- 2) Pendidikan dan pelatihan dan keterampilan bagi pencari kerja berbasis kompetensi (PBK)
dengan dana sebesar RP. 236.383.006,- dengan realisasi 236.161.251,- (99,9i%) dengan realisasi fisik sebesar (99,95) %.
- 3) Pelatihan kewirausahaan produktif



dengan dana sebesar 101.706.108,- dengan realisasi 100.903.408,- (99,21%)
dengan realisasi fisik sebesar 100 %.

4) Pelatihan peningkatan produktivitas tenaga kerja

dengan dana sebesar Rp.52.568.600,- dengan realisasi Rp.52.655.450,-
(99,60%) dengan realisasi fisik sebesar 100%.

5) Pemagangan dalam dan luar negeri

dengan dana sebesar Rp.70.954.706,- dengan realisasi Rp.70.954.706,-
(100%) dengan realisasi fisik sebesar 100%.

6) Pendidikan dan pelatihan bahasa asing bagi calon tenaga kerja dan magang
keluar negeri

dengan dana sebesar Rp.125.680.000,- dengan realisasi Rp.125.680.000,-
(100%) dengan realisasi fisik sebesar 100%.

7) Sertifikasi kompetensi bagi lulusan lembaga pelatihan (BLK dan LPKS)

dengan dana sebesar Rp.8.112.000,- dengan realisasi Rp. 8.162.000,-
(99,39%) dengan realisasi fisik sebesar (100%).

8) Kerjasama pelatihan dengan lembaga pelatihan kerja swasta(LPKS)

dengan dana sebesar Rp.2.000.000,- dengan realisasi Rp.2.000.000,- (100%)
dengan realisasi fisik sebesar 100%.

9) Kerjasama pelatihan dengan lembaga pelatihan kerja swasta(LPKS)

dengan dana sebesar Rp.4.411.000,- dengan realisasi Rp. Rp.4.411.000,-
(100%) dengan realisasi fisik sebesar 100%.

10) Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)

dengan dana sebesar Rp.17.222.112,- dengan realisasi Rp. Rp.16.383.600,-
(95,13%) dengan realisasi fisik sebesar 100%.

7. Program Pemberdayaan Tenaga Kerja

Tugas dari program ini adalah membantu Dinas dalam rangka melaksanakan
penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perluasan kesempatan kerja dan
melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi
penempatan tenaga kerja



Outcome (sasaran) dari program ini diharapkan menurunnya angka pengangguran dan meningkatnya peluang dan kesempatan kerja.

Besarnya anggaran yang tersedia untuk Program Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas adalah sebesar Rp.816.674.573,- dengan realisasi sebesar Rp.812.256.949,- (93,17 %) dengan realisasi fisik sebesar 96,66%. Untuk mewujudkan sasaran program ini dilakukan melalui 7 (tujuh) kegiatan yaitu: Kegiatan

- 1) Perluasan kesempatan kerja sektor informal bagi masyarakat melalui pembentukan kelompok wirausaha baru (WUB) dan padat karya infrastruktur dana sebesar Rp.330.238.800 dengan realisasi 330.238.800. (100%) dengan realisasi fisik sebesar (100%)
- 2) Pengembangan dan perluasan kesempatan kerja dalam dan luar negeri melalui penempatan tenaga kerja AKL,AKD,TKI,TKA dan informasi pasar kerja.
dengan dana sebesar 304.146.573,- dengan realisasi 302.180.562. (99,35%) dengan realisasi fisik sebesar (99,35%)
- 3) Penyuluhan calon tenaga kerja indonesia (CTKI)keluar negeri bagi tenaga perawat dan perawat lansia
dengan dana sebesar Rp. 69.033.800,- dengan realisasi 69.033.800,- (99,97%) dengan realisasi fisik sebesar 100%.
- 4) Monitoring dan pembinaan tenaga kerja sektor formal dan informal
dengan dana sebesar Rp.39.774.000,- dengan realisasi Rp.39.774.000,- (99,09%) dengan realisasi fisik sebesar 100%.
- 5) Pengembangan masyarakat melalui terapan teknologi tepat guna (TTG)
dengan dana sebesar Rp.113.255.400,- dengan realisasi Rp.110.824.547,- (87,85%) dengan realisasi fisik sebesar 97,85%.
- 6) Pendayagunaan tenaga sarjana (TKS)
dengan dana sebesar Rp.0,- dengan realisasi Rp.0,- (0%) dengan realisasi fisik sebesar 0%.



8. Program perlindungan dan Pengembangan lembaga ketenagakerjaan

Outcome dari program ini adalah membantu Dinas dalam rangka menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan ketenagakerjaan dan hubungan industrial d rangkamelaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan dan keamanan, kesehatan dan keselamatan .

Besarnya anggaran yang tersedia untuk Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan adalah sebesar Rp.745.971.142,- dengan realisasi sebesar Rp.743.966.150,- (99,73 %) dengan realisasi fisik sebesar 99,76%. Untuk mewujudkan sasaran program ini dilakukan melalui 6 (enam) kegiatan yaitu:

Kegiatan

- 1) Sosialisasi K3 dan penilaian penghargaan K3 dana sebesar Rp.104.900.000 dengan realisasi Rp. 104.847.300. (99,95%) dengan realisasi fisik sebesar (100%).
- 2) Penetapan UMP tahunan
dengan dana sebesar sebesar 202.229.742,- dengan realisasi 202.078.300,- (99,93%) dengan realisasi fisik sebesar 100%.
- 3). Pengembangan mekanisme lembaga kerjasama tripartit
dengan dana sebesar Rp.126.167.900,- dengan realisasi Rp.124.798.400,- (98,91%) dengan realisasi fisik sebesar (98,91%)
- 4). Pengawasan norma ketenagakerjaan dan sosialisasi perundang-undangan ketenagakerjaan dengan dana sebesar Rp.191.700.000.,- dengan realisasi Rp.191.645.045.,- (99,97%) dengan realisasi fisik sebesar 100%.
- 5). Penegak hukum/penyidikan dibidang ketenagakerjaan
dengan dana sebesar Rp.102.880.000,- dengan realisasi Rp.102.503.600,- (99,63%) dengan realisasi fisik sebesar 99,78%.
- 6). Pengujian lingkungan kerja
dengan dana sebesar Rp.18.093.500,- dengan realisasi b Rp.18.995.000,- (99,70%) dengan realisasi fisik sebesar 100%.



9. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Tugas dari program ini adalah membantu Dinas dalam rangka menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman dan pengembangan kawasan transmigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besarnya anggaran yang tersedia untuk Program pengembangan wilayah transmigrasi adalah sebesar Rp.434.185.000,-dengan realisasi sebesar Rp.425.793.260,- (98,07 %) dengan realisasi fisik sebesar 99,70%. Untuk mewujudkan sasaran program ini dilakukan melalui 5 (lima) kegiatan yaitu:

Kegiatan

- 1) Penanganan permasalahan lokasi transmigrasi
dengan dana sebesar Rp. 257.390.000,- dengan realisasi 253.708.760,- (98,57%) dengan realisasi fisik sebesar (100%)
- 2) Publikasi melalui informasi otensi lokasi dan kerjasama antar daerah
dengan dana sebesar 52.090.000,- dengan realisasi 49.010.000,- (94,09%) dengan realisasi fisik sebesar (99,09%)
- 3) Penyiapan Area Transmigrasi
dengan dana sebesar Rp.41.758.000.,- dengan realisasi Rp.41.458.000.,- (99,28%) dengan realisasi fisik sebesar 99,28%)
- 4) Monitoring pembangunan kawasan wilayah transmigrasi dengan dana sebesar Rp.28.530.500.,- dengan realisasi Rp.27.230.000,- (95,44%) dengan realisasi fisik sebesar (96,49%)
- 5) Monitoring Pengembangan kawasan wilayah transmigrasi dengan dana sebesar Rp.54.416.500.,- dengan realisasi Rp.54.386.500,- (99,94%) dengan realisasi fisik sebesar (100%)



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi merupakan wujud dari pertanggungjawaban yang berisikan informasi mengenai kinerja yang telah dilakukan oleh Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi pada Tahun 2020 atas pelaksanaan tugas dan fungsi dari organisasi dengan beserta pembiayaannya. Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi yang dikemukakan dalam laporan ini, telah mencoba menggambarkan kinerja yang telah dicapai berdasarkan alokasi dana dari kegiatan yang ditetapkan. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bab-bab terdahulu dan analisa pencapaian kinerja, baik dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi maupun pelaksanaan kegiatan rutin dan proyek dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi selama tahun 2020 melalui dana APBD Provinsi Jambi mendapatkan anggaran sebesar Rp. 7.806.373.660,- , setelah dilakukan Refocusing Anggaran untuk Covid- 19, sebesar 40,96 % menjadi sebesar Rp. 4.608.690.330,-. Untuk melaksanakan kegiatan Urusan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dengan realisasi keuangan Rp. 4.548.937.163,- (98,70%) dengan realisasi fisik 98,99%, untuk mendanai 9 Program.
2. Secara umum hasil pencapaian tugas pokok dan fungsi sebagaimana sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Daerah pada tahun 2020 dan dijabarkan dengan rencana Tahun 2020, masih ada kinerja yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana disebutkan pada permasalahan sebelumnya.
3. Dari hasil perhitungan pencapaian kinerja tersebut diatas masih diperlukan masukan-masukan untuk proses penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ditahun mendatang.



